

# REVIEW TARGET DAN CAPAIAN INDEKS PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL KOTA MALANG TAHUN 2020

Bidang Penelitian dan Pengembangan  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang  
*email: litbangkotamalg@gmail.com*

**Abstrak :** *Review* capaian kinerja pemerintahan adalah agenda tahunan yang harus dilaksanakan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. tidak hanya itu, tahun 2020 mengharuskan pemerintah untuk menelaah dampak pandemi terhadap target yang telah ditetapkan. Kota Malang memiliki 4 Misi dalam mencapai visi besarnya yang salah satu dari keempat misi tersebut disebut sebagai pembangunan bidang sosial kota malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Multi-methods* yang memungkinkan peneliti menggunakan beberapa metode penelitian sesuai dengan kebutuhan penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pandemi tidak berdampak begitu besar terhadap ketercapaian kinerja terhadap target baik dampak positif maupun negatif dalam pembangunan bidang sosial di Kota Malang. Beberapa indikator yang digunakan memerlukan kajian khusus terkait signifikansinya terhadap indikator di atasnya sehingga dari tahap program hingga tujuan berkesinambungan sesuai konsep *Urban Sustainable Development*.

**Kata kunci:** Pembangunan Sosial, Dampak Pandemi terhadap Pembangunan, *Urban Sustainable Development*.

**Abstract:** *Review of government performance achievements is an annual agenda that must be carried out in accordance with the mandate of statutory regulations. not only that, the year 2020 requires the government to examine the impact of the pandemic against the targets that have been set. Malang City has 4 Missions in achieving its big vision, one of which is called the social development of Malang City. This study uses a multi-methods approach that allows researchers to use several research methods according to research needs. The results of this study indicate that the pandemic does not have a significant impact on the achievement of performance towards targets, both positive and negative impacts of damaging social development in Malang City. Some of the indicators used require special studies related to their significance to the above indicators so that from the program stage to sustainable goals according to the concept of Urban Sustainable Development.*

**Keywords:** *Social Development, the impact of a pandemic on development, Urban Sustainable Development.*

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Pembangunan bidang sosial adalah salah satu bidang penunjang dalam mempercepat kesejahteraan masyarakat di Indonesia, hal ini sesuai dengan tujuan nasional yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar yakni kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga penting adanya di dalam pembangunan daerah. Pada dasarnya pembangunan daerah adalah perwujudan dari upaya bangsa dalam pembangunan nasional secara menyeluruh dan terpadu. Pembangunan daerah dalam bidang sosial dikembangkan dengan upaya berbagai

program dan kegiatan untuk menjamin, melindungi, mengendalikan, memelihara, dan memulihkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan bersama oleh pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah Kota Malang dalam melaksanakan proses pembangunan mengacu pada RPJMD Tahun 2018-2023 yang memiliki Visi pembangunan “Kota Malang Bermartabat”. Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan 4 (empat) Misi pembangunan daerah. Program bidang sosial merupakan perwujudan dari misi ke-3 Kota Malang yaitu: “Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran berasaskan Keberagaman

dan Keberpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender”.

Dalam program pembangunan bidang sosial Kota Malang Perangkat Daerah (PD) yang menjadi pengampu dari Misi ke-3 tersebut berjumlah 6 PD meliputi : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB), Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP), Kecamatan (Meliputi 5 Kecamatan yaitu: Lowokwaru, Klojen, Blimbing, Kedungkandang, dan Sukun), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang diterjemahkan dalam program-program disetiap PD tersebut.

Selain itu, pandemi virus covid-19 telah mempengaruhi kehidupan bermasyarakat di Kota Malang seperti sisi kesehatan, kebijakan, ekonomi dan keamanan sehingga tidak hanya kepentingan untuk melaksanakan kegiatan pengukuran ketercapaian target yang diselenggarakan secara tahunan, namun juga pengaruh dari pandemi covid-19 menyebabkan pentingnya memperhatikan pengaruh pandemi terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan sebelumnya.

## 2. Maksud dan Tujuan

Mengukur capaian indikator program pembangunan bidang sosial tahun 2020 yang meliputi:

- a. *Mereview* target/sasaran indikator pembangunan bidang sosial yang telah ditetapkan sebelumnya.
- b. Menganalisis antara hasil capaian yang diperoleh pada tahun 2020 dengan target/sasaran yang telah ditetapkan.

- c. Menganalisis relevansi target/sasaran indikator pembangunan bidang sosial dalam konteks pembangunan daerah pasca adanya pandemi Covid-19.
- d. Memberikan rekomendasi kebijakan apa yang perlu dilakukan terhadap hasil penelitian.

## 3. Sasaran

Sasaran dari kegiatan *Review Target dan Capaian Indeks Pembangunan Bidang Sosial* adalah tersedianya data dan analisis perbandingan antara sasaran dengan realisasi yang telah dan akan dicapai dalam program pembangunan bidang sosial di Kota Malang di tahun 2020–2023.

## 4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- e. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025;
- f. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2013-2018.

## 5. Kajian Teori

### a. Teori Kebijakan Publik dan Indikator Pembangunan

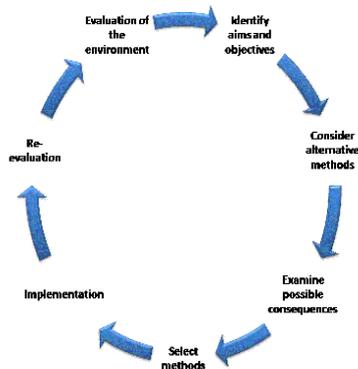
Pada bagian ini akan dijelaskan dua hal penting dalam penelitian ini, yaitu pertama tentang pentingnya indikator dalam kebijakan publik dan kedua adalah tentang bagaimana metode atau program apa yang harus dilakukan untuk mencapai indikator tersebut. Sebelum menginjak pada dua hal pokok bahasan tersebut maka perlu dijelaskan latar konseptual yang melandasinya. Kebijakan publik perlu dipahami dan didefinisikan sebagai penjelasan tentang hubungan antara negara, politik, ekonomi dan masyarakat, berbicara tentang proses kebijakan bukan konten (Minogue 1993). Sedangkan analisis dapat terbagi menjadi dua yaitu analisis tentang kebijakan (*analysis of policy*) biasanya akademis dan bersifat evaluatif dan kedua adalah analisis untuk kebijakan (*analysis for policy*) yaitu berangkat dari kondisi yang ada dan direkomendasikan kebijakan seperti apa. Dalam konteks penelitian ini maka masuk pada kategori yang kedua, yaitu bagaimana penelitian ini dapat memberikan penilaian dan rekomendasi bagi kebijakan pemerintah Kota Malang dalam

menetapkan indikator pembangunan di bidang sosial.

Operasionalisasi tujuan (indikator) harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum metode. Ini adalah titik kritis di mana bisa saja terjadi indikator mengambil alih kebijakan (Etzioni 1964). Apabila indikator menyimpang (atau overly simplified) dari nilai dan sasaran maka metode atau langkah-langkah yang diambil pada akhirnya juga tidak mencapai maksud dari nilai dan sasaran dari sebuah kebijakan. Indikator yang seperti ini dengan demikian bukan lagi menjadi proxy dari kebijakan publik melainkan menjadi pengganti kebijakan itu sendiri (Alcock 2004).

Setelah problem indikator terselesaikan dengan baik, maka hal berikutnya yang perlu dipahami adalah metode untuk mencapai indikator tersebut. Metode bisa saja tidak terkait langsung dengan indikator, misalnya menurunkan obesitas dengan cara mengadakan kontes olahraga. Hal yang harus hati-hati dalam menetapkan metode adalah adanya bias (kepentingan maupun ideologi) dari pelaksana serta kompromi-kompromi yang mengakibatkan metode terlalu jauh dari target (Patton & Sawicki 1993). Sulitnya implementasi harus disadari oleh analisis kebijakan, dan tidak hanya mengandalkan audit. Dalam hal ini, problem implementasi cukup krusial, misalnya kebijakan membangun jalan sudah baik tetapi kapasitas dari kontraktornya tidak memadai, desentralisasi mengakibatkan waktu pelaksanaan tertunda (Hill & Hupe 2003). Untuk memastikan bahwa metode yang dipilih adalah tepat untuk merespon indikator yang ada maka perlu dilakukan *process tracing*, apa

yang dilakukan, menghasilkan apa dan bagaimana hasil tersebut mengantarkan pada dampak.



Gambar 1. Proses Sirkulasi Kebijakan Publik

Sumber : <http://www.spicker.uk/social-policy>

### b. Urban Development

Ada beberapa poin yang bisa kita pakai sebagai dasar untuk memahami kota seperti yang diungkapkan oleh Daldjoeni (1997), sebagai berikut:

- 1) Sistem jaringan kehidupan manusia, ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi serta strata sosial ekonomi yang heterogen dan berkesan materialistis.
- 2) Suatu bentang budaya, timbul oleh unsur-unsur alami dan non-alamiah dengan gejala pemusatan daerah belakangnya (*hinterland*).
- 3) Tempat bermukim bagi warganya, tempat bekerja, hidup dan tempat berekreasi serta apabila dilihat dari udara, kota akan nampak susunan bangunan yang dikelilingi atau dibatasi oleh jalur-jalur jalan dan sungai dengan diselingi pepohonan besar kecil.

Paradigma pembangunan kota dalam prespektif spasial terdapat dua macam. Paradigma pertama disebut dengan *Urban Oriented Paradigm* (UOP), sedangkan yang kedua disebut *Rurban Oriented Paradigm* (ROP). Pemahaman akan kedua paradigma tersebut sangat penting, untuk menentukan kebijakan

pembangunan yang tepat bagi darahnya (Yunus, 2005):

- 1) *Urban Oriented Paradigm*, adalah padangan yang mempunyai filosofi “*city is just for urban resident or city is just for city itself*”. Landasan berpikir ini dilandasi oleh banyaknya lahan kosong baik itu di dalam wilayah kota terlebih di area pinggiran kota. Sehingga area tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun fungsi-fungsi kota yang baru untuk pengembangan perkotaan.
- 2) *Rurban Oriented Paradigm*, padangan ini merupakan kebalikan dari sebelumnya, dimana dengan menekankan pembangunan kota tidaklah untuk kota itu sendiri. Kota sendiri sebenarnya dikelilingi oleh area yang masih produktif, baik itu merupakan wilayah sub-urban maupun rural. Sehingga area disektir bukanlah area kosong yang tidak produktif, melainkan wilayah yang masih dipakai untuk pertanian dan lainnya oleh masyarakat.

Maka dengan mengacu pada paradigma yang ada, pemerintah dapat berpindah dengan hati-hati dalam menentukan kebijakan pembangunannya. Konsep *sustainable development* menjadi salah satu pilar penting yang harus disematkan. Karena pembangunan perkotaan tidak bisa berdiri sendiri, namun juga bergantung pada pengembangan area sekitarnya, peri-urban maupun desa. Kota tidaklah bisa mementingkan pada kebutuhan daerahnya sendiri, namun juga memperhatikan daerah lainnya.

### METODE

#### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian kali ini metode yang digunakan adalah *multi methods* yang

artinya dimana setiap pertanyaan dijawab dengan metode yang berbeda-beda yang mana setiap pertanyaan bisa dijawab dengan satu metode atau lebih sesuai dengan kebutuhan peneliti untuk menghasilkan jawaban yang diinginkan, hal ini berbeda dengan pendekatan *mixed methods* yang digunakan untuk menjawab setiap pertanyaan dengan semua metode penelitian yang digunakan. Dalam penelitian *review* target dan capaian indikator ini ada 4 pendekatan yang digunakan yaitu:

- a. Kuantitatif Deskriptif, digunakan untuk menjawab pertanyaan yang pertama yaitu mengukur capaian indikator program pembangunan bidang sosial.
- b. Analisis Faktor, digunakan untuk menjawab pertanyaan yang kedua dalam melakukan *review* target/sasaran indikator pembangunan bidang sosial yang telah ditetapkan sebelumnya.
- c. *Gap Analysis*, digunakan untuk menjawab pertanyaan yang ketiga yakni untuk menganalisis antara hasil capaian yang diperoleh pada tahun 2020 dengan target/sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Proses *Tracing* merupakan pendekatan untuk menjawab pertanyaan kedua dan empat (Analisis relevansi target/sasaran indikator pembangunan bidang sosial dalam konteks pembangunan daerah pasca adanya pandemi Covid-19) serta sebagai dasar untuk menjawab tujuan yang ke lima yaitu rekomendasi kebijakan pasca penelitian.

## 2. Sampel dan Populasi

Menurut Singarimbun (1981) Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga. Singkatnya populasi merupakan sekelompok objek yang akan menjadi

sasaran penelitian. Populasi dan sampel pada penelitian ini digunakan untuk mengukur IPMas dan IMS. Berdasarkan penelitian yang sudah ada sebelumnya, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penduduk Kota Malang yang berusia 17 tahun keatas. Menurut data BPS penduduk Kota Malang yang berusia >17 tahun berjumlah 700.348 jiwa. Populasi penelitian tersebar di 5 kecamatan dan 57 kelurahan. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 278 orang

## 3. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan Teknik *probability* sampling, dimana dalam pengambilan sampel semua elemen mempunyai peluang untuk terpilih menjadi sampel. Penelitian ini menggunakan taraf kesalahan sebesar 6% dengan sampel penelitian sejumlah 278 orang yang ditentukan berdasarkan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana :

n = Sampel

N = Populasi

e = Batas kesalahan penarikan sampel 6%

$$n = \frac{700348}{1 + (700348 \times (0.06)^2)}$$

=277,7 atau 278 responden

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka sampel yang di dapat untuk mendapatkan hasil survei terkait Indeks Pembangunan Masyarakat dan Indeks Modal Sosial adalah 278 responden.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan kuisioner atau angket sebagai teknik pengumpulan data, menurut Saptawi Bardosono (2009:2) kuisioner merupakan kumpulan

pertanyaan-pertanyaan yang disusun untuk dijawab oleh responden berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Kuisisioner ini digunakan untuk mengukur Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) dan Indeks Modal Sosial (IMS). Indikator penyusun IPMas terdiri dari indeks gotong royong, indeks toleransi, dan indeks rasa aman. Sedangkan IMS terdiri dari: (1) Sikap Percaya dan Toleransi yang mencakup sikap percaya, toleransi agama, toleransi sosial, toleransi suku, dan toleransi politik; (2) Aksi bersama mencakup resiprositas dan aksi bersama; dan (3) Kelompok dan jejaring mencakup partisipasi dalam kelompok dan jejaring.

Untuk mengukur IPMas dan IMS dengan indikator diatas, peneliti menggunakan skala Likert yang dikategorikan menjadi 5 kategori dalam setiap nilai variable kajian melalui jawaban setiap responden terhadap pertanyaan. Setiap jawaban diberi skor 1-5 seperti tabel berikut:

Tabel 1. Skala Likert

No	Jawaban responden	Skor	Nilai Interval	Kategori	Ket
1	Sangat Tidak Setuju	1	1,00 – 1,80	E	Tidak Baik
2	Tidak Setuju	2	1,81 – 2,60	D	Kurang Baik
3	Cukup	3	2,61 – 3,40	C	Cukup
4	Setuju	4	3,41 – 4,20	B	Baik
5	Sangat Setuju	5	4,21 – 5,00	A	Sangat Baik

Sumber : Olahan Penulis

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

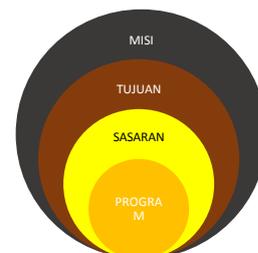
**1. Gambaran Umum**

Setiap periode pemerintahan memiliki visi dan misi yang merupakan karakteristik umum sebuah kebijakan kepala pemerintahan terkait target yang ingin dicapai selama masa ke pemerintahannya, RPJMD adalah sebuah dokumen perencanaan

pembangunan yang memberikan gambaran secara runtut tentang kebijakan dan program yang diambil untuk mencapai visi dan misi ke pemerintah dalam jangka waktu 5 tahun. Dokumen RPJMD disusun secara sistematis sehingga dapat menjadi pedoman sekaligus alat untuk mengukur capaian target kinerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip indikator kinerja sesuai permendagri 86 tahun 2017 dan PER/09/M.PAN/5/2007 tentang penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah pasal 8 yaitu :

- a. Spesifik (*specific*)
- b. Terukur (*measurable*)
- c. Dapat dicapai (*achievable*)
- d. Relevan (*relevant*)
- e. Berjangka waktu (*time-bound*)

Sistematika pencapaian Visi dan Misi yang ingin dicapai tersebut dituangkan dalam RPJMD secara terstruktur dan sistematis sehingga setiap bentuk terkecil dalam kebijakan publik menjadi sarana untuk mencapai tujuan besar yaitu Visi dan Misi Pemerintahan. Adapun Visi Pemerintahan dituangkan dalam bentuk beberapa misi yang sinergi dengan visi tersebut, kemudian pada tahap kedua setiap misi diterjemahkan kembali kedalam bentuk tujuan-tujuan yang menjadi sarana untuk mencapai suatu misi, selanjutnya tujuan yang telah ada dipertajam kembali yang akan menjadi bentuk beberapa sasaran.



Gambar 2. Hirarki Misi, Tujuan, Sasaran, Program

Sumber : Hasil Analisa

Setiap Tahapannya mengharuskan adanya alat ukur capaian kinerja yang disebut sebagai Indikator baik pada tingkat tujuan, sasaran sampai pada program. Indikator tidak harus satu bisa jadi dalam satu komponen dari tahapan itu memiliki lebih darisatu indikator untuk mengukur ketercapaiannya.

Berikut adalah *Cascading* yang menggambarkan setiap tahapan pembangunan bidang sosial kota malang beserta OPD pengampunya:



Gambar 3. *Cascading* Pembangunan Bidang Sosial Kota Malang  
 Sumber : *Bappeda Kota Malang*

Diatas telah dipaparkan indikator yang digunakan sebagai ukuran pada tingkat Tujuan dan Sasaran, sedangkan pada tingkat program hanya disebutkan judul program dan setiap OPD Pengampunya. Hal itu dikarenakan jumlah indikator dalam programnya sangat banyak sehingga untuk memperingkas bahasan tentang indikator setiap tahapannya akan dijelaskan pada bagian hasil capaian masing-masing tahapan.

Bila diringkas dalam sebuah tulisan satu paragraf pada tingkat tujuan terdapat 2 indikator yaitu:

- a. Angka kemiskinan
- b. Indeks Modal Sosial

Pada tingkat sasaran terdapat dua sasaran yang masing-masing memiliki indikator sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas perlindungan sosial dengan Indikator Persentase penurunan PMKS yang diampu oleh Dinsos P3AP2KB dan Disnaker PMPTSP
- b. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan menggunakan dua indikator yaitu: 1) Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas), 2) Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Dan pada tingkat program ada 13 program yang telah disebutkan pada cascading yang nantinya akan disebutkan secara rinci pada sub-bagian Hasil Capaian Indikator Program.

## 2. Hasil Capaian Indikator Tujuan

### a. Angka Kemiskinan

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Adanya pandemi covid pada tahun 2020 menyebabkan berbagai dampak tidak terkecuali meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia. Badan Pusat Statistik Indonesia mengeluarkan data kenaikan angka kemiskinan di Jawa Timur pada maret 2020 yang mengalami kenaikan sebesar 1,12 persen jika dibandingkan dengan data pada September 2019. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan presentase penduduk miskin di Indonesia, tidak terkecuali Kota Malang yang juga terdampak pandemi covid. Melihat data pada tahun-tahun sebelumnya, angka kemiskinan Kota Malang mengalami tren penurunan dari tahun 2015-2019. Dikarenakan adanya pandemi covid maka peneliti memproyeksikan angka kemiskinan di Kota Malang tahun 2020 dengan mengambil nilai optimis sebesar 4,21%.

Berikut angka kemiskinan Kota Malang dan prediksi tahun 2020:



Gambar 4. Proyeksi Angka Kemiskinan Tahun 2020

Sumber: Hasil Analisa

Indikator angka kemiskinan tercatat dalam RPJMD memiliki angka capaian 3,76% pada tahun 2020. Namun jika melihat dari angka prediksi diatas maka angka kemiskinan diatas meningkat dari 4,07% di tahun 2019 menjadi 4,21% di tahun 2020, dapat dikatakan juga angka kemiskinan pada tahun ini tidak mencapai target yang ditetapkan yakni 3,76 karena memiliki angka yang lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Hal ini terjadi karena adanya pandemi covid-19 yang melumpuhkan kondisi ekonomi masyarakat Kota Malang sehingga mempengaruhi capaian target angka kemiskinan di Kota Malang.

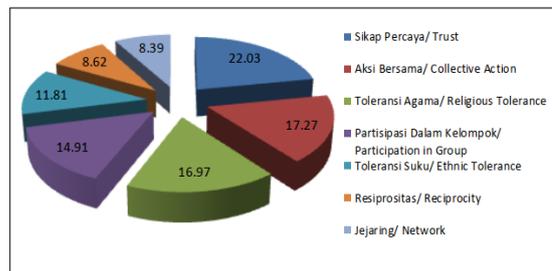


Gambar 5. Target dan Capaian Angka Kemiskinan Tahun 2020

Sumber : Hasil Analisis

b. Indeks Modal Sosial

Indeks modal sosial disusun oleh tujuh faktor/komponen yaitu: indeks sikap percaya, indeks aksi bersama, indeks toleransi agama, indeks partisipasi dalam kelompok, indeks toleransi suku, indeks resiprositas, dan indeks jejaring. Menurut Badan Pusat Statistik ketujuh faktor tersebut menjelaskan 76,32 persen variasi didalam data serta memiliki bobot nilai yang berbeda-beda dalam membentuk indeks sosial, adapun bobot nilainya adalah sebagai berikut:



Gambar 6. Faktor Pembentuk Indeks Modal Sosial

Sumber : Badan Pusat Statistik (2014)

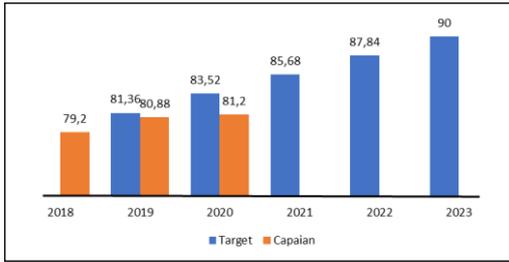
Dengan melihat angka faktor pembentuk indeks modal sosial diatas, peneliti melakukan survey di 57 kelurahan di Kota Malang dan hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Indeks Modal Sosial

Indeks Modal Sosial	Hasil
Kota Malang	<b>81,20</b>
Lowokwaru	<b>81,29</b>
Klojen	<b>79,91</b>
Blimbing	<b>81,29</b>
Kedungkandang	<b>81,23</b>
Sukun	<b>83,08</b>

Sumber : Data Primer diolah

Dari penjumlahan setiap faktor pembentuk indeks modal sosial diatas, dihasilkan angka indeks modal sosial Kota Malang sebesar 81,20, artinya indeks modal sosial pada tahun ini belum mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya yakni 83,52%.



Gambar 7. Target dan Capaian Indeks Modal Sosial

Sumber : Data Primer diolah

### 3. Hasil Capaian Indikator Sasaran

#### a. Persentase Penurunan PMKS

Adapun data capaian presentase penurunan PMKS tahun 2015 sampai tahun 2019 adalah sebagai berikut:

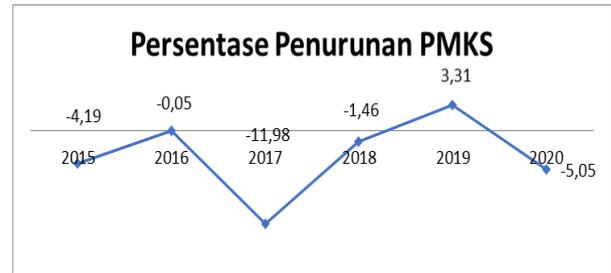


Gambar 8. Capaian Penurunan PMKS Kota Malang 2015-2019

Sumber : Dinsos Kota Malang

Berdasarkan gambar diatas, presentase penurunan PMKS memiliki angka yang fluktuatif setiap tahunnya. Terutama pada tahun 2019 yang mengalami peningkatan sebesar 3,31. Hasil prediksi peneliti dari data 5 tahun diatas menunjukkan adanya kenaikan pada tahun 2020 menjadi 135.357 jiwa dengan nilai pesimis (batas bawah) sebesar 121.651 jiwa dan nilai optimis (batas bawah) sebesar 149.099 jiwa yang digambarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & ((\sum PMKS\ thn\ (n) - thn\ (n - 1)) / (\sum PMKS\ thn\ (n - 1)) \times 100\% \\
 & = ((135.357 - 128.882) / 128.882) \times 100\% \\
 & = 5,05\%
 \end{aligned}$$



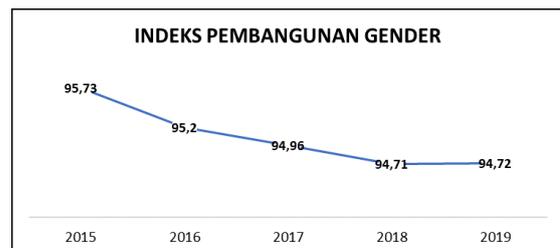
Gambar 9. Proyeksi Persentase Penurunan PMKS

Sumber : Hasil Analisa

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan yang cukup tajam pada tahun 2020 yakni sebesar -5.05%, artinya presentase penurunan PMKS tahun ini belum mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya yakni 5. Hal ini terjadi karena adanya pandemi covid yang diprediksi menyebabkan angka kemiskinan meningkat sehingga data fakir miskin juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

#### b. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

IPG tersusun dari tiga komponen dengan 4 sub komponen yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hanya saja terpilah gender yaitu hasil IPM perempuan dibagi dengan IPM Laki-laki sehingga semakin mendekati angka 1 maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Malang mengalami naik turun selama 5 tahun terakhir. Dari tahun 2015 hingga 2018 IPG Kota Malang mengalami penurunan, sedangkan pada tahun 2019 mengalami peningkatan seperti yang digambarkan dibawah ini:



Gambar 10. Indeks Pembangunan Gender

Sumber : BPS Kota Malang

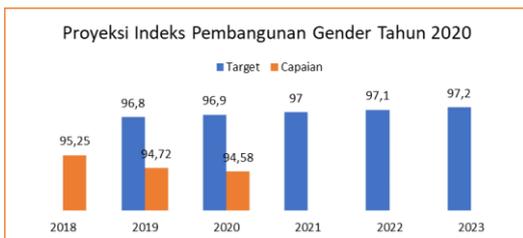
Tabel 3. Proyeksi IPG

IPG	Hasil Proyeksi 2020
IPM Perempuan	80,86 %
IPM Laki-Laki	85,49 %

Sumber : Hasil Analisa

$$\begin{aligned}
 \text{IPG} &= \frac{\text{IPM Perempuan}}{\text{IPM Laki - laki}} \times 100\% \\
 &= \frac{80,86}{85,49} = 94,58\%
 \end{aligned}$$

Dari hasil prediksi diatas maka IPG pada tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.



Gambar 11. Proyeksi Indeks Pembangunan Gender Tahun 2020

Sumber : Hasil Analisa

c. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)

Indeks pembangunan masyarakat terbentuk dari tiga komponen, yaitu: indeks rasa aman, indeks toleransi, indeks gotong royong. Indeks pembangunan masyarakat diperoleh dari suvey yang dilakukan peneliti dengan menyebarkan angket dan wawancara kepada masyarakat. Perhitungan bobot indeks adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Bobot nilai rata - rata} &= \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah item}} \\
 &= \frac{1}{22} = 0,0455
 \end{aligned}$$

Setelah itu dihitung menggunakan nilai rata-rata tertimbang

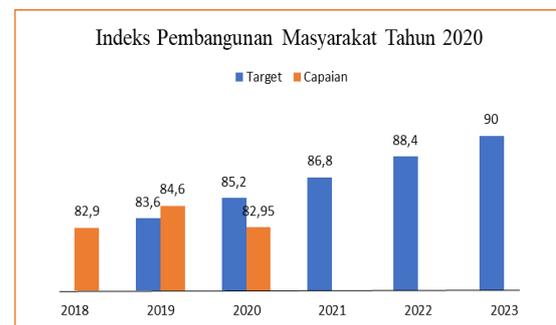
$$\begin{aligned}
 &\text{Nilai rata - rata terbagi unsur} \\
 &= \frac{\text{total nilai persepsi per item}}{\text{Total item yang terisi}} \times \text{Nilai P}
 \end{aligned}$$

Hasil survey yang dilakukan oleh peneliti, angka capaian Indeks Pembangunan Masyarakat Kota Malang mencapai 82,95% dari target indikator awal yaitu 85,2%. Dari angka tersebut dapat dikatakan bahwa indeks pembangunan masyarakat di Kota Malang masih belum memenuhi target pada tahun ini.

Tabel 4. IPMas Per-kecamatan Kota Malang

Indeks Pembangunan Masyarakat	Hasil
Kota Malang	82,95
Lowokwaru	82,45
Klojen	83,01
Blimbing	82,09
Kedungkandang	83,12
Sukun	84,67

Sumber : Hasil Analisa



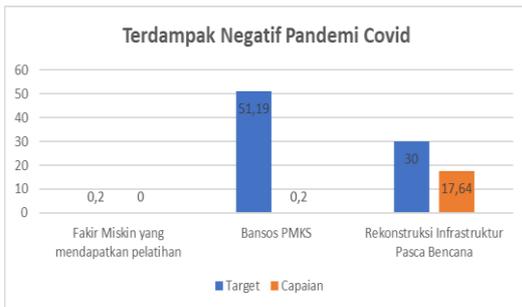
Gambar 12. Indeks Pembangunan Masyarakat per-tahun kota malang

Sumber : Hasil Analisa

4. Dampak Ketercapaian Kinerja dengan adanya Pandemi Covid-19

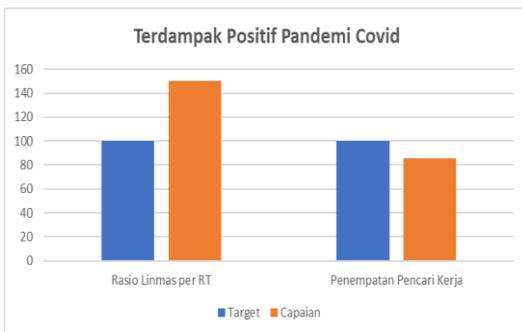
Ada beberapa indikator yang tidak dapat dijalankan dikarenakan habisnya anggaran seperti rekonstruksi infrastruktur pasca bencana dan PMKS yang mendapat bantuan sosial, ada juga indikator yang tidak dapat dilakukan dikarenakan kebijakan yang tidak memperbolehkan pengumpulan massa seperti indikator fakir miskin yang mendapatkan pelatihan. Justru kondisi

pandemi membantu ketercapaian beberapa indikator yang ada seperti indikator rasio linmas yang meningkat dikarenakan kebutuhan perlindungan masyarakat semakin tinggi, dan pekerja yang ditempatkan karena banyaknya lowongan kerja yang kembali membuka kesempatan untuk calon pekerja.



Gambar 13. Indikator Terdampak Negatif oleh Pandemi Covid

Sumber : Hasil Analisa



Gambar 14. Indikator Terdampak Positif oleh Pandemi Covid-19

Sumber : Hasil Analisa

Adanya bantuan dari pusat dan provinsi untuk warga yang terdampak covid tidak masuk dalam indikator bantuan sosial kepada fakir miskin yang berada dalam Dinsos P3AP2KB, tetapi hal tersebut adalah diluar ukuran pencapaian bantuan sosial dari Dinsos P3AP2KB sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya adanya bantuan yang membantu dalam bidang sosial tersebut memang membantu pembangunan bidang sosial di kota malang walaupun hal tersebut tidak dijadikan sebagai kinerja pencapaian pembangunan bidang sosial sesuai indikator yang ada.

## 5. Analisis relevansi target/sasaran indikator pembangunan bidang sosial dalam konteks pembangunan daerah pasca adanya pandemi Covid-19

Dalam penelitian yang menggunakan metode SEM (*Struktural Equation Modelling*) peneliti harus mengetahui tahapan-tahapan yang akan ditentukan dikarenakan standar penelitian SEM ini selalu berhubungan dengan hasil uji statistik.

Dari penghitungan statistik tersebut peneliti dapat melihat beberapa hasil relevansi melalui uji signifikansi dua kelompok sebagai berikut:

- Signifikansi variabel Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pembangunan Masyarakat, dan Persentase Penurunan PMKS terhadap variabel antar kelompok yaitu Indeks Modal Sosial
- Signifikansi variabel Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pembangunan Masyarakat, dan Persentase Penurunan PMKS terhadap variabel antar kelompok yaitu Angka Kemiskinan

Pada gambar diatas terlihat masing-masing nilai signifikansi variabel independen (IPG, IPMas dan Penurunan PMKS) terhadap variabel dependen antar kelompok (Indeks Modal Sosial dan Angka Kemiskinan). Jika hasil T Statistik menunjukkan nilai dibawah 1.96 maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesa Variabel independen tidak signifikan membangun variabel dependen sehingga pada P Values terlihat nilai yang menunjukkan penolakan terhadap signifikansi yang digambarkan dengan warna merah. Sedangkan jika nilai T Statistics diatas 1.96 maka dapat dipastikan P. Values akan memiliki nilai

gagal tolak yang artinya signifikan terhadap variabel dependen.

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwasanya signifikansi yang tidak mendapatkan penolakan statistik hanyalah hubungan antara variabel penurunan PMKS terhadap angka kemiskinan. Sedangkan untuk kombinasi variabel independen yang lainnya mengalami penolakan signifikansi dikarenakan tidak memenuhi standar signifikansi uji T dengan nilai diatas 1.96

## KESIMPULAN

Secara umum capaian indikator pembangunan bidang sosial memiliki ketercapaian yang tinggi meskipun pada tahun ini terdampak pandemi covid. Pandemi covid memberikan dampak negatif terhadap beberapa program sehingga tidak mencapai angka yang ditargetkan dikarenakan adanya pemotongan anggaran atau kebijakan tertentu yang menghambat penyelenggaraan kegiatan seperti pelatihan keterampilan untuk fakir miskin, rekonstruksi infrastruktur pasca bencana yang belum selesai, dan peningkatan pemahaman ideologi yang terhambat. Disisi lain pandemi covid memberikan dampak positif terhadap ketercapaian beberapa program yang lain seperti ratio linmas per-RT dan penempatan pencari kerja, adanya penjagaan yang ketat terhadap lingkungan di setiap keluarahan menjadikan ratio limas per-RT memiliki capaian yang tinggi. Meskipun adanya pandemi ini memberikan dampak yang positif maupun negatif, tetapi sampai saat ini belum ada rencana dari perangkat daerah (PD) untuk merubah target capaian pada tahun 2021

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan peneliti, masih terdapat beberapa program yang tumpang tindih seperti program “Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan kondisi Ekonomi,

Sosial, Budaya dan Agama” yang diampuh oleh Bangkesbangpol yang tertulis tiga kali didalam RPJMD. Seharusnya tidak ada lagi tumpang tindih dalam sebuah program karena dikhawatirkan menimbulkan ketidakjelasan baik secara kegiatan maupun secara anggaran.

Seharusnya ada indikator lain untuk mengukur keaktifan suatu lembaga yang dapat menggambarkan “keaktifan lembaga kemasyarakatan” lebih rinci dalam program yang diampuh oleh kecamatan, hal ini dikarenakan ketidakjelasan pengukuran indikator yang dipakai oleh kecamatan tersebut sehingga perlu ada indikator atau penjelasan lebih rinci dalam mengukur keaktifan suatu lembaga kemasyarakatan.

## SARAN

Beberapa indikator dan indeks yang memiliki signifikansi kecil terhadap sasaran maupun tujuan dapat dipertimbangkan untuk diganti dengan melihat indeks-indeks yang lain seperti:

### 1. Indeks Ketahanan Keluarga

Dalam Indeks ketahanan keluarga ini ada 2 indikator yang sama dalam indeks modal sosial yakni partisipasi dalam kegiatan sosial dan partisipasi keagamaan di lingkungan. Indeks ketahanan keluarga digunakan di Indonesia dan di beberapa kota seperti Kota Bogor dan Bantul, Indeks ini memiliki 5 dimensi dan 24 indikator. Publikasi pembangunan ketahanan keluarga di Indonesia berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Peningkatan Ketahanan Keluarga dan

- Perlindungan Anak Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yaitu pada Pasal 1 Ayat 11;
  - c. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga.

### 2. Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks yang populer digunakan pada kota-kota di daerah Indonesia seperti Jakarta, Bandung, sampai dengan Blitar, juga setiap provinsi di Indonesia menggunakan menggunakan Indikator ini seperti Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan menjadi Indikator di bidang Polhukam pada sasaran Konsolidasi Demokrasi pada RPJMN tahun 2020 – 2024. Tersusun atas 3 aspek pokok yang menjadi dimensi indeks tersebut yaitu aspek kebebasan berpendapat, aspek hak-hak politik, dan aspek lembaga demokrasi. Indeks demokrasi memiliki 28 indikator.

### 3. Indeks Kota Islami

Dicetuskan oleh Maarif Institute pada tahun 2015 pada awalnya sempat menuai kontroversi dikarenakan komponen yang menyusun indeks tersebut tidak memiliki arah yang sama dengan pejuang-pejuang syariat Islam di Indonesia. Adapun indeks tersebut tersusun atas aspek nilai-nilai positif dalam Islam, dan juga menjauhi formalisasi syariat Islam sendiri dikarenakan sarat akan kepentingan politik dan ekonomi. Pada dasarnya Indeks Kota Islami tersusun berdasarkan maqashid syariah yang ada 5 dalam ilmu ushul fiqh yaitu Aman, Sejahtera, Bahagia yang masing-masing memiliki faktor pembentuk sendiri yang total semuanya adalah 10 indikator.

### 4. Indeks Keadilan Sosial Indonesia

Baru saja diperkenalkan oleh Indonesia Social Justice Network pada perayaan hari ulang tahun Indonesia ke-75. IKSI tersusun atas 8 dimensi yang ditujukan untuk mengukur kualitas keadilan sosial yang diklaim sebagai indeks pertama yang mengukur keadilan sosial di Indonesia. 8 dimensi tersebut adalah : Penanggulangan kemiskinan, Akses terhadap pendidikan, Kohesi sosial dan Non-Diskriminasi, Akses terhadap layanan kesehatan, Lapangan kerja inklusif, Keadilan antar generasi, penegakan hukum, Demokrasi dan tata kelola publik yang baik.

Hasil perhitungan IKSI nasional pada tahun 2020 adalah 63.46 persen yang artinya adalah sekitar jumlah tersebut masyarakat Indonesia yang terpenuhi keadilan sosialnya dengan kata lain enam dari sepuluh orang di Indonesia terpenuhi keadilan sosialnya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alcock, 2004, Targets, indicators and milestones, *Public Management Review* 6(2) pp.211–229.
- Checkland, Peter and Poulter, John (2006) *Learning for Action: A Short Definitive Account of Soft System Methodology and its use for Practitioners, Teacher and Student*, John Wiley and Sons, Ltd, Chichester
- Etzioni, 1964, *Modern organizations*, Englewood Cliffs: Prentice Hall, pp 8–10.
- Hill, P Hupe, 2003, The multi-layer problem in implementation research, *Public Management Review* 5(4) 471–491.
- Korpi, J Palme, 1998, The paradox of redistribution, *American Sociological Review* 63(5) 661–687.